

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Krisna Yuna Dana

Ni Kadek Natalia Pratiwi ⁽¹⁾

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi ⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾ Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 e-mail: kadeknataliapratiwi2001@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain how internal control system components are applied when granting credit at PT. BPR Krisna Yuna Dana. In order to gather information for this descriptive qualitative study of loan provision at PT. BPR Krisna Yuna Dana, informants were interviewed and observations were made. Data gathering, reduction, presentation, and conclusion/verification are the analysis techniques used. On the basis of the findings and debate, it is possible to draw the conclusion that PT. BPR Krisna Yuna Dana has successfully implemented the internal control system for credit provision. Nonetheless, there are gaps in the communication and informational components, and there is currently little knowledge on the awarding of approved or disapproved credit decisions, and failures still occur when authorizing the granting of credit in communication via the system. through the Banking Smart System application. Apart from that, in the control environment element, there is still a dual task and authority because the existing organizational structure is not yet clear and control activities include policies and procedures and there is no separation of credit giving functions between legal & credit analysis and monitoring & remedial. In this case, the credit provider is also responsible for monitoring the debtor's financial performance during the credit loan which results in arrears in payments, giving rise to bad credit or problematic credit.

Keywords: *internal control system, credit provision*

PENDAHULUAN

Khususnya di bidang ekonomi, perbankan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, bank terdiri dari bank umum dan bank BPR, akronim dari Bank Perkreditan Rakyat, yang fungsinya hanya menghimpun dana dan memberikan kredit kepada masyarakat. Namun, setelah UU. RI No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) mulai berlaku pada 12 Januari 2023, istilah "Bank Perkreditan Rakyat" atau BPR telah diganti menjadi "Bank Perekonomian Rakyat". Sri Mulyani mengatakan bahwa perubahan nama dilakukan untuk menghidupkan kembali peran BPR sebagai penggerak ekonomi Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah. bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, termasuk upaya untuk meningkatkan literasi dan intermediasi perbankan melalui percepatan konsolidasi dan pengaturan dampak digitalisasi perbankan.

Menurut UU No. 4 Tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa meskipun BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) karena stigma yang melekat pada BPR selama ini adalah bahwa mereka hanya menangani urusan kredit, meskipun sebenarnya BPR juga menyediakan layanan perbankan lainnya seperti tabungan dan deposito. Digitalisasi layanan, inklusi keuangan, dan pendidikan masyarakat semuanya dapat berfungsi. Dengan mengubah nama, fungsi BPR menjadi lebih kuat dengan memperluas bidang usaha ke transfer dana yang tetap diawasi oleh OJK dan penukaran valuta asing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran BPR dalam mendukung bisnis UMKM, yang pada gilirannya dapat membantu perekonomian Indonesia. Istilah BPR berubah menjadi perekonomian, membuka lebih banyak ruang kerja, terutama untuk sistem pengendalian internal. Agar tujuan perusahaan dapat dicapai, sistem pengendalian internal sangat penting. Selain menjaga keamanan aktiva, sistem pengendalian internal mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Tanpa sistem ini, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai (Tuanakotta, 2014:127). Komisi Sponsor Organisasi Komite Treadway (COSO) adalah model Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang sering dipergunakan oleh auditor sebagai pondasi untuk mengevaluasi dan mengembangkan SPI.

SPI membantu menjaga aset aman, memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan, dan meningkatkan efisiensi operasional (Tuanakotta, 2014:127). Komisi Sponsor Organisasi Komite Treadway (COSO) adalah model sistem pengendalian internal yang sering digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi dan membangun sistem pengendalian internal.

Bank atau lembaga keuangan akan meminjamkan kredit jika mereka benar-benar yakin bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak. Bisa ada konsekuensi di kemudian hari, seperti penunggakan pembayaran, jika debitur tidak mematuhi peraturan tersebut. Banyak faktor memengaruhi timbulnya tunggakan kredit, tetapi penelitian ini hanya membahas faktor sistem pengendalian internal. Dalam sistem ini, analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah debitur atau calon debitur layak untuk mendapatkan kredit.

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian—hati-hati dalam pemberian kredit yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik—dibutuhkan. Akibatnya, peneliti tertarik untuk mempelajari situasi dan kondisi yang berkaitan dengan fenomena sistem pengendalian internal, yang sangat penting untuk pemberian kredit. Didasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin

melakukan penelitian pemberian kredit dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR KRISNA YUNA DANA”**

KAJIAN PUSTAKA

Pada 12 Januari 2023, UU.RI No. 4 Tahun 2023 tentang (RUU P2SK) menghidupkan kembali peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penggerak ekonomi Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah, adalah alasan mengapa namanya diubah. Ruang kerja BPR menjadi lebih luas karena istilah diubah menjadi "perekonomian". Selama ini, BPR dikenal hanya melayani urusan kredit, tetapi sebenarnya mereka juga menyediakan layanan perbankan seperti tabungan dan deposito. Digitalisasi layanan, inklusi keuangan, dan edukasi masyarakat semuanya dapat berfungsi.

Bagian Kedua, Pasal 1 RUU P2SK mendefinisikan Bank Perekonomian Rakyat sebagai bank yang melakukan bisnis secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dengan perubahan nama, fungsi BPR semakin kuat karena bidang usahanya diperluas ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan peran BPR semakin besar dalam mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

SPI terdiri dari struktur organisasi, metode, dan dimensi, seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi (2016:163). Semua elemen ini digabungkan untuk memastikan bahwa organisasi tetap kaya, memeriksa data akuntansi dengan hati-hati, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pelaksanaan kebijakan manajemen. Definisi ini menekankan tujuan daripada komponen—komponen yang membentuk sistem tersebut. Jason Scott (2014:226) mengatakan SPI yakni proses yang dilaksanakan untuk memastikan suatu tujuan pengendalian telah dicapai. Namun, menurut Komite Sponsoring Organisasi Komite Treadway (COSO) (1992), SPI yakni suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan staf lainnya. Dibangun untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (3) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut COSO, sistem pengendalian internal terdiri dari dua unsur: (1) Lingkungan pengendalian, yang merupakan set aturan, prosedur, dan struktur yang membentuk dasar sistem pengendalian internal di seluruh organisasi, dan (2) Penaksiran risiko, yang merupakan proses

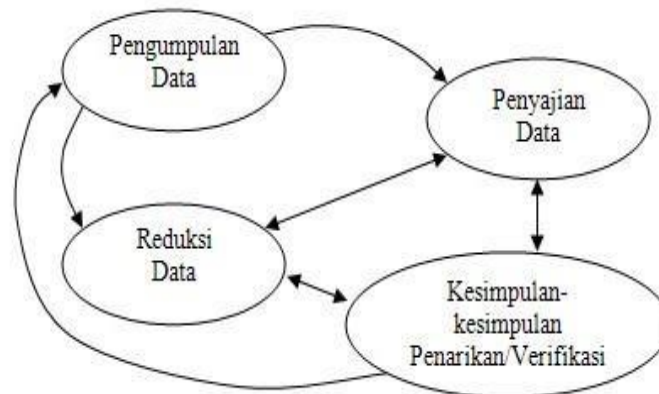
dan tujuan yang terus berubah yang menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dalam hal ini, analisis, tindakan, dan evaluasi digunakan untuk menilai risiko perusahaan. Mengidentifikasi perubahan internal dan eksternal serta tindakan yang diperlukan adalah tahapan yang paling penting dari penilaian risiko. Untuk memastikan bahwa arahan organisasi tidak mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan dan prosedur mengatur tindakan yang dikenal sebagai pengendalian. Tahapan keempat adalah informasi dan komunikasi, yang mencakup informasi yang diperlukan entitas untuk memenuhi tanggung jawab sistem. Seluruh sistem pengendalian internal, yang mencakup pembentukan kebijakan, analisis risiko, dan pengawasan yang dilakukan, akan sangat sulit untuk dijalankan jika tidak ada informasi dan komunikasi ini. (5) Pemantauan adalah upaya untuk memastikan bahwa masing-masing dari lima bagian sistem pengendalian internal ada dan beroperasi dengan benar.. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh sistem mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan model atau metode yang disebut desain penelitian untuk mengarahkan penelitian mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka (Cresswell, 2016). Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Krisna Yuna Dana" membahas tentang lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Indikator juga dimasukkan dan dijelaskan tentang hasil dan diskusi.

Untuk analisis deskriptif, data dikumpulkan melalui pertanyaan lisan kepada bagian-bagian yang terlibat dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit, yaitu pimpinan, staf untuk pengendalian internal, bagian legal & analisis kredit, bagian marketing lending, dan bagian admin. Objek pada penelitian ini yaitu PT. BPR Krisna Yuna Dana yang merupakan salah satu Bank Perekonomian Rakyat yang berlokasi di Batubulan.

Peneliti memakai metode observasi, wawancara dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data untuk analisis ini. Untuk menemukan solusi untuk rumusan masalah, peneliti menggunakan berbagai teknik analisis data, diantaranya yaitu :



Dua metode analisis data digunakan dalam penelitian ini. (1) Wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka adalah metode pengumpulan data; dan (2) Teknik reduksi data didasarkan pada tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Selain itu, reduksi data adalah proses yang membutuhkan banyak pemikiran dan wawasan. Dalam hal ini, bisa melalui observasi untuk mendapatkan data awal dan mempersiapkan draft wawancara terkait topik penelitian, (3) Teknik penyajian data : Dalam penelitian kualitatif, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data. Dengan menyajikan data ini, data disusun dan diorganisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasikan/menggolongkan data wawancara kemudian menguraikan hasilnya secara menyeluruh. (4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Hasil penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Hasil penelitian dapat berupa gambaran atau deskripsi dari hal-hal yang sebelumnya tidak jelas yang menjadi jelas setelah penelitian. Misalkan Anda membandingkan hasil data dengan bagian dan teori yang didasarkan pada prinsipnya. Teknik triangulasi data mencakup tiga komponen: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mereka digunakan untuk mengukur metode uji keabsahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa aspek lingkungan pengendalian diteliti dalam penelitian ini. Yakni :

1) Dari integritas dan nilai etika, Dalam hal ini, PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah memiliki kebijakan yang tertulis di dalamnya kebijakan tertulis dan lisan tentang etika dalam sistem pemberian kredit yang yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKPB). Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan integritas dan nilai etika dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 2) Dari komitmen terhadap kompetensi, PT. BPR Krisna Yuna Dana merekrut karyawan—pekerja yang memiliki bakat dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mereka ditempatkan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan

keterampilan mereka. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan komitmen terhadap kompetensi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

3) Dari dewan komisaris dan komite audit, Komite audit yang merupakan bagian pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yaitu dalam hal ini Direksi yang berperan dalam mengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan dewan komisaris dan komite audit dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) Pimpinan bank telah memberikan contoh yang baik dari filosofi manajemen dan gaya operasi dalam kebijakan manajemen dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, memberikan arahan, dan selalu memotivasi karyawan untuk bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya., misalkan pada saat jam kerja, setiap pagi hari sebelum memulai aktivitas pekerjaan, Pimpinan Bank berkumpul dengan karyawan untuk mengadakan doa bersama dan membaca visi dan misi dari PT. BPR Krisna Yuna Dana beserta memberikan arahan, dorongan, dan semangat terhadap kinerja karyawan kedepannya. Selain itu juga, Pimpinan Bank selalu mengadakan kegiatan rutin rapat / meeting bulanan yaitu pada pertengahan bulan pada tanggal 15 (menyesuaikan situasi dan kondisi jika tidak ada halangan) dan pada saat semua pekerjaan karyawan sudah selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan filosofi manajemen dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

5) Dari struktur organisasi, masih terdapat perangkapan tugas dan wewenang yang terjadi karena struktur organisasi yang ada belum jelas, misalkan pada bagian legal & analisis kredit dalam tugas dan wewenang masih jadi satu antara fungsi legal dan fungsi analisis kredit. Selain itu juga, pada bagian monitoring & remedial juga dalam tugas dan wewenang masih jadi satu antara fungsi monitoring dan fungsi remedial. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan struktur organisasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 6) Dari kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya, untuk mendukung operasional layanan perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia, PT. BPR Krisna Yuna Dana telah melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan baik secara online maupun offline yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pajak, maupun lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Tujuan perusahaan secara keseluruhan, tujuan di setiap tingkat proses, identifikasi dan analisis risiko, dan pengelolaan perubahan adalah beberapa aspek penaksiran risiko dalam penelitian ini.

1) Dari tujuan perusahaan secara keseluruhan, Pimpinan Bank selalu melakukan estimasi penilaian risiko terhadap setiap kebijakan yang akan diambil. Dalam hal ini, BPR memiliki 4 eksposur risiko yang paling dominan dialami sesuai dengan ketentuan dari OJK, yakni : (1) Risiko Kredit, (2) Risiko Operasional, (3) Risiko Likuiditas dan (4) Risiko Kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 2) Dari tujuan di setiap tingkat proses, Pimpinan Bank selalu mengedepankan prinsip kehati – hatian dan prinsip tata kelola dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Agar setiap keputusan yang diambil memiliki potensi risiko yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan tujuan di setiap tingkat proses dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

3) Dari identifikasi risiko dan analisisnya, dalam hal ini PT. BPR Krisna Yuna Dana selalu melakukan evaluasi, identifikasi dan penilaian terhadap seluruh risiko yang ada dan kemungkinan muncul. Dalam hal ini, PT. BPR Krisna Yuna Dana telah memiliki Divisi Khusus yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko Bank yakni PE Kepatuhan / SPI. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan identifikasi dan analisis risikonya dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) PT. BPR Krisna Yuna Dana akan mengelola perubahan dengan meninjau keadaan dan kondisi saat ini jika terjadi masalah. Misalnya, mereka akan mengubah struktur organisasi jika diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan mengelola perubahan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Dalam penelitian ini, aktivitas pengendalian mengamati beberapa hal, yakni :

1) Dari kebijakan dan prosedur, adanya kebijakan dalam setiap proses, mulai dari proses permohonan kredit, proses SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), proses wawancara & survey ke lapangan (on the spot), proses komite kredit, proses pengikatan kredit dan proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan prosedur mengenai penanganan saat terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Selain itu juga, terkait kebijakan pemisahan fungsi beserta tugas dan wewenang yang merupakan suatu prinsip dan praktik yang digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu pun yang memiliki kontrol penuh atas suatu proses bisnis atau

aktivitas yang bisa menghasilkan kecurangan atau pelanggaran. Dalam hal ini, tentu masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam SOP. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan kebijakan dan prosedur dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

2) Dari keamanan aplikasi dan jaringan, PT. BPR Krisna Yuna Dana sesuai dengan Penerapan Standar Teknologi Informasi yaitu POJK No. 75/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2017 atau SOP Pedoman Kebijakan IT dan Rencana Bisnis Berkelanjutan di bidang IT tanggal 07 Desember 2017. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan keamanan dalam hal aplikasi jaringan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 3) Aplikasi Smart Banking System digunakan dalam manajemen perubahan aplikasi untuk memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan untuk memastikan bahwa berkas-berkas yang diajukan sesuai untuk memenuhi fasilitas kredit. Karena itu, PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan manajemen perubahan dan aplikasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) Dari kelangsungan bisnis, dari bagian IT melakukan strategi khusus mengenai penyimpanan cadangan dokumen, misalkan jika tiba – tiba terkendala atau komputer rusak, maka semua data yang ada di komputer sudah di backup di harddisk agar tidak hilang. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan kelangsungan bisnis dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Dalam penelitian ini, informasi dan komunikasi mengamati beberapa hal, yaitu kualitas informasi dan efektivitas komunikasi.

1) Dari kualitas informasi, dalam hal penyampaian informasi, misalkan dalam hal komite kredit dalam hal pemberian keputusan kredit jika hasilnya tidak disetujui, maka dari pihak marketing lending akan menyampaikan ke nasabah dan jika disetujui maka dari pihak marketing lending akan memberikan informasi kepada nasabah untuk dibuatkan PK (Perjanjian Kredit). Namun dalam hal ini, masih kurangnya dalam penyampaian informasi terkait pemberian keputusan kredit disetujui atau tidak disetujui bahkan tidak ada respon / tanggapan dan jawaban sama sekali dari Pimpinan Bank. Hal ini tentu sangat menyimpang dari ketentuan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan kualitas informasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

2) Dari efektivitas komunikasi, dimana Pimpinan Bank memberikan pemahaman yang jelas tentang peranan dan tanggung jawab masing-masing karyawan sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif atau nyaman dalam hal berkomunikasi sesama karyawan / rekan kerja bisa melalui WA grup untuk memastikan keadaan situasi secara efektif dan efisien misalkan pada

karyawan yang bekerja di luar kantor, jika komunikasi lewat sistem misalkan pada karyawan yang bekerja dalam kantor, menggunakan aplikasi Banking Smart System dalam menginput data kredit tersebut sudah diapprove atau tidak di approve dilihat dari otorisasi dalam pemberian kredit, maka selanjutnya dari pihak karyawan akan berkomunikasi lewat telepon kantor kepada Pimpinan Bank untuk memberikan persetujuan terkait otorisasi dalam pemberian kredit tersebut. Namun dalam hal ini, masih saja terdapat kredit di sistem yang tidak diotorisasi oleh Pimpinan Bank sehingga menimbulkan kegagalan dalam otorisasi pemberian kredit. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang tidak terkendali dan potensi pembengkakan portofolio kredit macet atau kredit bermasalah. Tentu ini yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Hal ini tidak sesuai dengan aturan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah tidak sesuai dengan penerapan efektivitas komunikasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

1) Pemimpin bank selalu mengawasi dan mengontrol semua tindakan pekerja.. Pemantauan kinerja karyawan yang berada di dalam kantor melalui perangkat CCTV. Pemantauan dari segi struktur yang berperan pada aktivitas karyawan dalam pemberian kredit yang terdiri dari PE Kepatuhan / SPI, Legal & Analis Kredit, Admin, Marketing Lending, dan Monitoring & Remedial. Akan tetapi, Karena aktivitas yang dilakukan sebagian besar di luar kantor, bagian marketing lending menerima pemantauan yang lebih ketat. Bagian ini harus memberikan laporan melalui grup WA yang dirancang khusus oleh Pimpinan Bank berupa foto yang dikirim melalui WA grup untuk mengetahui sejauhmana kinerja karyawan tersebut.

2) Dari evaluasi yang terpisah, setiap bulan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semua divisi dan jika dinilai terdapat penyimpangan, kelemahan atau pelanggaran dalam pengendalian internal perkreditan, maka Pimpinan Bank akan melakukan tindakan koreksi dan dilakukan evaluasi secara berkala terkait efektifitas sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan evaluasi yang terpisah dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 3) Dalam melaporkan kekurangan – kekurangan yang terjadi, jika terdapat kekurangan, kelemahan atau pelanggaran dalam hal aktifitas pemberian kredit maka bagian kredit akan selalu berkomunikasi dengan Pimpinan Bank, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya beragam eksposur risiko dikemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan melaporkan kekurangan – kekurangan yang terjadi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

SIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan analisis dan pembahasan penelitian yang dilaksanakann terkait penerapan sistem pengendalian internal yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan yaitu pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Krisna Yuna Dana telah menerapkan unsur sistem pengendalian internal menurut Teori COSO dalam pemberian kredit yang sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi dari lima unsur sistem pengendalian internal tersebut, masih ada yang perlu dievaluasi / diperbaiki yaitu pada unsur yang tidak sesuai yaitu pada informasi dan komunikasi masih kurangnya dalam penyampaian informasi terkait pemberian keputusan kredit disetujui atau tidak disetujui bahkan tidak ada respon / tanggapan dan jawaban sama sekali dari Pimpinan Bank dan juga masih terjadi kegagalan pada saat pemberian otorisasi dalam pemberian kredit dalam komunikasi lewat sistem melalui aplikasi Banking Smart System sehingga mengakibatkan banyaknya kredit yang tidak diotorisasi oleh Pimpinan Bank yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang tidak terkendali dan potensi pembengkakan portofolio kredit macet atau kredit bermasalah. Tentu ini yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah.

Selain itu juga, pada unsur lingkungan pengendalian yaitu masih terdapat perangkapan tugas dan wewenang karena struktur organisasi yang ada belum jelas dan pada aktivitas pengendalian pada kebijakan dan prosedur dan tidak adanya pemisahan fungsi pemberi kredit antara bagian legal & analis kredit dan monitoring & remedial. Dalam hal ini, peranan tugas pemberi kredit adalah untuk menetapkan syarat – syarat kredit mengurangi risiko dan mengevaluasi risiko agar tetap terkendali dan analisis kelayakan terhadap calon debitur dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Pemberi kredit juga bertanggung jawab untuk memantau kinerja keuangan debitur selama peminjaman kredit berlangsung yang mengakibatkan tunggakan pembayaran sehingga menimbulkan terjadinya masalah kredit.

Berdasarkan analisis SPI pemberian kredit yang dilaksanakn ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan dan peneliti yang akan melakukan penelitian tentang subjek ini:

Untuk menghindari perangkapan tugas dan wewenang, perusahaan harus melakukan evaluasi terkait penambahan atau pembentukan karyawan baru. Ini karena fungsi dan tugas yang tidak sesuai dipisahkan dari tugas dan wewenang. Perusahaan juga dapat meminta pimpinan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan baru.

Selanjutnya dihimbau untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian untuk menemukan waktu yang tepat bagi peneliti untuk mencari / menemukan data dan tidak mengganggu pimpinan dan karyawan pada saat bekerja, dalam hal ini keterbatasan dalam hal

mencari pimpinan yang susah dicari, bisa melalui perwakilan dan mencari alternatif yang lain untuk ditambah dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliandu, B., Londa, Y., Marselina, A., & Akuntansi, P. S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Di Larantuka. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 1–7.
- Ayudia, R., Aswansyah, D., Ekonomi, F., Itb, B., & Jakarta, S. (n.d.). *REMITTANCE ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI DI BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU TEBET JAKARTA SELATAN*.
- F. F. D. Pasalbessy, V. (2021). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 55–72. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.72>
- Kamaluddin, N., & Haryati, M. A. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama. *Monex*, 9(1), 109–118. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1772%0Ahttp://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/viewFile/1772/1101>
- Kartikasari, J. D., Nikmatuniayah, N., & Asrori, M. (2021). Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Ksp Lohjinawe Cabang Pembantu Kundurankantor Cabang Blora. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v4i1.2791>
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- Pasaribu, A. R., Purba, D. H., & Sitorus, P. J. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Investasi Pada Bank Mandiri Pusat Pasar Medan. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 17-26.
- Rangian, M. M., Nangoi, G. B., & Wokas, H. R. . (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Di PT Bukopin Finance Graha Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 415. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32197/30555>
- Wijoyo, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 157–162.